

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan Publik berdasarkan Undang undang Republik Indonesia no 25 Tahun 2009 pasal 1 merupakan suatu kegiatan atau rangkaian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif bagi setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 16 Tahun 2014, pelayanan public yang dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat kota Bekasi jika dilihat dari berbagai keluhan masyarakat yang terjadi pada pelayanan permasalahan tanah sebagai contoh fenomena yang terjadi adalah keluhan layanan masyarakat yang terjadi pada layanan permasalahan pertanahan yang menempati urutan keempat (Suara Ombudsman, 2018) Dampak buruk yang ditimbulkan adalah terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Fenomena ini menyebabkan Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menegaskan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan serta mendistribusikan informasi dan pelayanan public (Inpres No 3 Tahun 2003). Langkah utama yang harus diambil dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi adalah mempersiapkan pengguna teknologi untuk menerima dan menggunakan teknologi.

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan sebuah alat teoritis yang baik (Park, 2009), populer (Priyanka dan Kumar, 2013), dan menawarkan suatu penjelasan yang kuat dan sederhana (Davis, 1989) untuk mempelajari penerimaan dan penggunaan teknologi (Venkatesh, 2000). Niat merupakan predisposisi perilaku actual (Ajzen, 1975) yang dipengaruhi oleh computer self efficacy (Venkatesh, 2000; Rose dan Fogarty, 20006; Teo et al, 20008; Park, 2009; Yusof et al., 2009; Abramson, 2015), Persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi (Davis, 1989; Huetal., 1999; Venkatesh, 2000; Rose dan Fogarty, 2006; Teo et al., 2008; Park, 2009; Yusof et al., 2009; Lin dan changb, 2011; Suki dan suki, 2011; Abramson, 2015) serta sikap dalam menggunakan

teknologi (Davis et al., 1989; Hu et al., 1999; Rose dan Fogarty, 2006; Teo et al., 2008; Park, 2009; Lin dan Chang, 2011; Suki dan Suki, 2011; Abramson, 2015)

Sel efficacy menurut Bandura (2015) merupakan penilaian seseorang terhadap kemampuannya dalam mengorganisasi dan memutuskan tindakan yang diperlukan dan tujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Individu dengan Self efficacy rendah akan merusak motivasi melalui perasaan bahwa mereka tidak mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut dicobanya (Davis, 1989). Kajian literatur mengindikasikan bahwa self efficacy berpengaruh pada persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi. Menurut Rose dan Fogarty (2006) dalam penelitiannya terhadap 208 responden mendapatkan hasil bahwa teknologi tersebut bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Hasil penelitian ini mendukung Penelitian Park (2009); Vankatesh (2000); Yusof et al. (2009); dan Abramson (2015). Persepsi manfaat merupakan suatu ukuran dimana penggunaan teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya, sedangkan persepsi kemudahan terhadap penggunaan teknologi adalah suatu ukuran dimana seseorang yakin bahwa komputer dapat dipahami dan digunakan dengan mudah (Davis, 1989). Kajian literatur mengindikasikan persepsi manfaat akan dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan karena sebuah teknologi. Berdasarkan uraian di atas yang didasarkan pada penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi keuangan Daerah. Meningkatnya kebutuhan informasi mengakibatkan kebutuhan pengembangan sistem informasi juga meningkat. Adanya suatu pengembangan sistem akan membantu perusahaan untuk mempermudah pengelolaan data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk mencapai tujuannya, tiap instansi atau perusahaan memerlukan sistem yang bisa mengatur semua proses bisnis yang terjadi, mulai dari proses mengumpulkan, mengirimkan, memasukan, mengolah dan menyimpan data-data tentang kejadian atau peristiwa ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas atau operasi organisasi sehari-hari.

Pemerintah daerah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut yaitu menyediakan informasi keuangan yang

komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk di dalamnya informasi keuangan daerah (IKD). Pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyampaikan IKD kepada stakeholder. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah direvisi dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, telah diatur mengenai penyelenggaraan SIKD. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kota Bekasi merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menyelenggarakan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah disyaratkan bahwa kepada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk keperluan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bekasi diharapkan mampu untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

SIKD di Pemerintah Daerah Kota Bekasi diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah). SIMAKDA merupakan suatu sistem informasi yang telah dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan keuangan. Dengan sistem informasi ini pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Menurut Muhammad (2019), penerapan teknologi informasi dalam jajaran pemerintahan akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi terutama pada sumber daya

manusianya. Faktor sumber daya manusia sebagai pengguna dan pemakai sistem informasi sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena tingkat kesiapan penggunaan untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya pengembangan sistem tersebut (Kustono, 2018 dalam Tangke, 2018:10). Keberadaan sistem Informasi keuangan daerah (SIKD) di Pemerintah Daerah Kota Bekasi belum tentu dirasakan manfaatnya oleh pegawai/pemakai sistem, karena penggunaannya untuk pengolahan data akuntansi dan kegiatan lain kemungkinan tidak selalu mendatangkan kemudahan bagi pegawai. Bahkan sebaliknya, keberadaan teknologi informasi tersebut dapat mendatangkan kesulitan bagi pegawainya.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh atas penerimaan pegawai (pemakai) terhadap SIKD di Pemerintah Daerah Kota Bekasi, maka diperlukan suatu model yang menggambarkan tingkat penerimaan terhadap teknologi yaitu Technology Acceptance Model (TAM). TAM merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai (Jogiyanto, 2020:111). Model penerimaan teknologi atau technology acceptance model (TAM) ini pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1989). Tujuan utama TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang penentuan penerimaan komputer secara umum dan memberikan penjelasan tentang perilaku/sikap pengguna dalam suatu populasi (Davis. 1989:985). Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai penerimaan individu terhadap sistem teknologi informasi di pemerintahan daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan Menggunakan Technology Acceptance Model pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini ingin menjabarkan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) di Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan menerapkan model penerimaan teknologi (technology acceptance model/TAM) dan melihat hubungan antar variable menurut model tersebut. Sesuai model TAM, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut “Bagaimana Aplikasi Akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan Technology

Acceptance Model pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi teknologi Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil analisis ini dinantikan mampu menjadi referensi untuk mewariskan petunjuk yang nyata atau masukan bagi perkembangan sistem informasi khususnya sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem yang dikembangkan berdasarkan model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*), sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai model penerimaan teknologi untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

#### 2) Manfaat Pekerja

Hasil analisis ini dinantikan dapat mempersembahkan sumbangsih kepada pihak penyelenggaraan untuk melihat kondisi teknologi informasi terutama untuk teknologi informasi keuangan daerah agar lebih signifikan dan sesuai dengan teknologi yang diaplikasikan oleh pegawai dalam pengendalian keuangan daerah.

#### 3) Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu kumpulan yang diambil seseorang, badan atau lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah ini dapat diterapkan oleh pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor publik serta individu. Tujuan kebijakan adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.